Oleh : Ir. Arif Satria, M.Si. *)

MENUJU GERAKAN KELAUTAN

Ibarat tikus mati kelaparan di lumbung padi. Itulah refleksi ironi pembangunan kita, yakni bahwa kemiskinan nelayan masih terjadi di tengah limpahan kekayaan sumberdaya laut. Siapa yang salah? Apakah nelayan yang salah karena tidak mau dan tidak mampu mentransformasi diri menjadi nelayan yang tangguh? Ataukah pemerintah yang salah karena tidak ada kesempatan bagi nelayan untuk melakukan mobilitas vertikal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua macam perspektif.

Pertama, adalah aliran modernisasi yang selalu menganggap bahwa persoalan kemiskinan disebabkan faktor internal masyarakat. Dalam aliran ini, kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat dari faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal dan teknologi, serta keterbatasan manajemen. Karena itu, aliran ini selalu sarat dengan proposal modernisasi nelayan, yaitu bahwa sudah sepatutnya nelayan merubah budayanya, meningkatkan kapasitas teknologinya, serta memperbaiki sistem usahanya.

Kedua, adalah aliran struktural yang selalu menganggap bahwa faktor eksternal-lah yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Jadi, menurut aliran ini nelayan miskin bukan karena budayanya atau terbatasnya modal, melainkan karena faktor eksternal yang menghambat proses mobilitas vertikal nelayan. Faktor eksternal tersebut berjenjang, baik pada tingkat mikro-desa maupun makro-struktural. Pada tingkat mikro-desa, masih ditemukan sejumlah pola hubungan patron-klien yang bersifat asimetris. Yakni, suatu pola hubungan dimana terjadi transfer surplus dari nelayan ke patron. Sementara itu pada tingkat makro-struktural, belum adanya dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan sehingga sektor tersebut tidak mampu berkembang sebagaimana sektor-sektor lainnya.

Dari dua perspektif tersebut nampaknya teori struktural lebih mendekati kenyataan. Jadi, bukan karena nelayan tidak mau maju, tetapi lebih karena nelayan tidak memiliki kesempatan untuk maju. Untuk membuat nelayan maju diperlukan pendekatan-pendekatan struktural, baik mengatasi *problem patron-klien* maupun di tingkat desa, maupun meningkatkan dukungan politik untuk kemajuan nelayan di tingkat makro. Artinya perlu kebijakan-kebijakan afirmatif yang secara riil mendorong nelayan untuk melakukan mobilitas vertikal.

Namun demikian, jika kita berangkat dari masalah kemiskinan nelayan tentu orang pun akan bertanya : mungkinkah dengan mengatasi kemiskinan nelayan secara otomatis akan meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional ? Apakah nelayan-nelayan yang berskala kecil itu dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan ?

Barangkali para penganut paham liberal jelas akan pesimis. Karena mereka selalu berpikir bahwa pelaku-pelaku kecil akan sangat sulit dijadikan agen pertumbuhan. Menurut mereka, tumbuhnya para pelaku kecil tersebut akan merupakan akibat dari adanya *trickle down effect* dari pertumbuhan yang diciptakan pelaku besar.

Jadi, untuk percepatan pembangunan sektor ini, para penganut liberal akan selalu merekomendasikan pentingnya mendorong usaha-usaha skala besar. Apakah pandangan kaum liberal ini cukup realistis?

*) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan IPB ; Sedang Mengambil Program Doktor Bidang Marine Policy di Kagoshima University Jepang

Bahwa pelaku besar akan mampu mendorong terciptanya pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan tentu jawabannya "ya". Tapi apakah dengan tumbuhnya sektor ini akan menciptakan *trickle down effect*, selama ini belum bisa terbukti secara empiris. Justru yang terjadi adalah trickle up effect; yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Jadi, ketika kita sudah sepakat bahwa sektor kelautan dan perikanan mesti didongkrak sehingga berperan secara signifikan terhadap ekonomi nasional, kembali lagi pada persoalan : apakah mekanisme kaum liberal atau kaum radikal yang akan dipilih.

Pada hemat penulis, untuk konteks kelautan dan perikanan dikotomi liberal dan radikal secara ekstrim nampaknya kurang pas. Saat ini memang kita membutuhkan sektor ini bisa tumbuh . Namun di sisi lain pilihan secara ekstrim terhadap dua aliran tersebut juga akan menemui masalah. Oleh karena itu, orang awam pun akan merekomendasikan upaya "jalan tengah". Upaya "jalan tengah" memang secara teoritik kurang populer, namun untuk kebutuhan pragmatis nampaknya perlu dicoba. Upaya "jalan tengah" tersebut memiliki makna *"growth through equity"*, artinya pertumbuhan melalui pemerataan. Implikasinya bahwa pertumbuhan yang didorong tidak berpusat pada aktor-aktor tertentu, melainkan kepada nelayan banyak. Lalu, bagaimana konkritnya ?

Saat ini Pusat Kajian Agraria IPB tengah mengembangkan konsep "agribisnis berbasis komunitas" (ABK). Ini merupakan antitesis terhadap konsep agribisnis yang selama ini didengung-dengungkan Prof. Bungaran Saragih. Karena, konsep agribisnis Bungaran Saragih masih sangat kental teknokratisme dimana masyarakat menjadi absen. Dalam konsep ABK dikenal adanya tiga jenis modal, yaitu modal alami, modal ekonomi, dan modal sosial yang selanjutnya akan terus bersinergi. Modal alami sudah jelas, yaitu sumberdaya hayati laut yang akan dimanfaatkan. Sementara itu modal ekonomi berupa teknologi, uang, sarana dan prasarana usaha, dst, yang umumnya dimiliki kaum pemodal atau pengusaha besar. Adapun modal sosial dapat berupa organisasi sosial, institusi lokal, maupun pengalaman-pengalaman tradisional nelayan. Nah, selama ini yang berkembang adalah pertemuan antara modal alami dengan modal ekonomi atau modal alami dengan modal sosial. Kondisi demikian jelas akan menimbulkan dualisme ekonomi. Dan, konsep ABK adalah hendak mengkombinasikan tiga kekuatan tersebut sehingga ekonomi dualistik tidak tercipta. Sebaliknya yang tercipta adalah tumbuhnya ekonomi dengan aktor yang beragam. Jadi, konsep ABK dapat dijadikan instrumen untuk mengatasi kemiskinan nelayan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.

Namun demikian, untuk mensukseskan ABK kelautan tersebut tidak hanya bisa bertumpu pada kebijakan Departemen kelautan dan perikanan. Tetapi terkait juga dengan instansi lain, seperti departemen keuangan, lembaga perbankan, Dep.Kimpraswil, Depkop, Deperindag, serta POLRI dan TNI, dan masih banyak lagi instansi terkait. Dukungan sektor lain secara sistematis merupakan salah satu prasyarat untuk itu. Namun untuk menggalang dukungan sektor lain perlu dukungan politik dari Presiden. Dan, Presiden-lah yang seyogyanya memegang kendali untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Karena, sektor inilah yang masih mungkin dijadikan dinamisator ekonomi nasional. Kemasan program percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di bawah kendali presiden itulah yang sering saya sebut sebagai "Gerakan Kelautan". Akan tetapi untuk implementasi gerakan tersebut kita mesti belajar dari kegagalan-kegagalan gerakan nasional masa lalu, seperti Bimas. Hal ini mengingat kita berada pada alam desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang menuntut pendekatan partisipatif, bottom up, profesional, dst. Tiga variabel lingkungan baru tersebut mesti menjadi pertimbangan pokok dalam implementasi nanti, sehingga kesalahan dan kegagalan masa lalu tidak terulang lagi.